

Analisis Implementasi Kebijakan tentang Pendidikan Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SLTA Kota Palu

Olvianty Olvianty^{1*} & Sagaf S. Pettalongi²

¹Doktor Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Olvianty, E-mail: titin.olvi@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 4

KATAKUNCI

Pendidikan Inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus, Implementasi Kebijakan, Tenaga Pendidik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Kota Palu serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Pendidikan inklusi merupakan pendekatan strategis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan ABK secara setara dalam lingkungan sekolah reguler. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Dinas Pendidikan dan sekolah inklusif di Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SLTA Kota Palu telah berjalan sesuai harapan, ditandai dengan tersedianya tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas pendukung, serta komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini meliputi pola komunikasi, sumber daya manusia, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Keberadaan sekolah reguler yang menyediakan layanan inklusi memberikan alternatif pendidikan khusus yang lebih terjangkau dan inklusif bagi ABK di Kota Palu. Namun, tantangan seperti keterbatasan sarana prasarana dan kebutuhan peningkatan kapasitas guru masih perlu diatasi untuk meningkatkan mutu pendidikan inklusi secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai sistem pelayanan pendidikan inklusif yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan inklusi di daerah lain.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu tanpa terkecuali, termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pendidikan inklusi merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dalam lingkungan sekolah reguler. Konsep pendidikan inklusi menekankan pentingnya mengakomodasi perbedaan dan keberagaman peserta didik agar dapat belajar bersama tanpa diskriminasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan sosial dan emosional anak agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Di Indonesia, pendidikan inklusi telah menjadi perhatian penting pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

**Olvianty Mahasiswa Program Studi PAI UIN Datokarama Palu.* Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Kebudayaan mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat lokal, termasuk di Kota Palu.

Kota Palu sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki berbagai sekolah menengah atas (SLTA) yang mulai mengadopsi pendidikan inklusi untuk ABK. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SLTA merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa ABK mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pola komunikasi antar pemangku kepentingan.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi sangat dipengaruhi oleh kesiapan sekolah, kompetensi guru, dukungan fasilitas, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SLTA Kota Palu menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi bagi ABK di SLTA Kota Palu, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusi di Kota Palu dan daerah sejenis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Kebijakan Publik Thomas R. Dye

Thomas R. Dye adalah seorang akademisi terkemuka dengan keahlian di bidang kebijakan publik. dan ilmu politik yang terkenal dengan kontribusinya dalam analisis kebijakan dan teori kebijakan publik. Lahir 16 Desember 1935 dan meninggal dunia pada 19 September 2021. Dye dikenal luas melalui bukunya *Understanding Public Policy*, yang menjadi salah satu teks dasar dalam studi kebijakan publik. Dalam buku ini, ia membahas berbagai aspek kebijakan publik, termasuk proses pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye, adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Dye menggarisbawahi bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup undang-undang dan regulasi yang diadopsi, tetapi juga proses yang melibatkan pemilihan tujuan, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan keputusan. Ia menyatakan bahwa kebijakan publik adalah manifestasi dari apa yang pemerintah lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Definisi ini mencerminkan pentingnya peran pemerintah dalam menentukan arah dan prioritas dalam penyelesaian isu-isu sosial. Kebijakan publik memiliki ciri-ciri tertentu, seperti bersifat resmi dan legal, mengandung tujuan yang jelas, serta melibatkan penggunaan sumber daya pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Teori ini menyoroti keputusan pemerintah dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dye juga menyatakan bahwa kebijakan publik adalah proses dinamis yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks pendidikan inklusi, kebijakan publik memiliki peran kunci dalam menyediakan aksesibilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kebijakan ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa ABK mendapatkan pendidikan yang layak dan setara di sekolah umum. Teori kebijakan publik Dye memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana kebijakan inklusi dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi, serta bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya berperan dalam proses tersebut. Dalam konteks pendidikan inklusi, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan peraturan yang memberikan hak dan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara di sekolah umum. Dye juga menyoroti pentingnya aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Teori Dye juga menyoroti pentingnya memahami siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, baik di tingkat pemerintah, institusi pendidikan, maupun masyarakat. Kebijakan pendidikan inklusi tidak hanya sebatas regulasi formal, tetapi juga bagaimana para pelaksana kebijakan, seperti dinas pendidikan, guru, kepala sekolah, dan orang tua, memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan. Faktor-faktor ini mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Metodologi

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap objek yang diteliti melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus di SLTA Kota Palu. Fokus pendekatan ini adalah pada realitas sosial yang kompleks, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau data kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi perspektif personal, pengalaman, dan persepsi dari berbagai aktor kebijakan dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas sosial yang ada, khususnya terkait implementasi kebijakan inklusi. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara rinci tanpa mempengaruhi objek yang diteliti. Kualitatif deskriptif memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap nuansa-nuansa sosial dan interaksi yang terjadi di lapangan, serta bagaimana kebijakan diterjemahkan dan diimplementasikan dalam konteks lokal. Dalam pendidikan inklusi, terdapat dimensi-dimensi yang hanya bisa dipahami melalui dialog langsung dan observasi situasional.

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara menyeluruh tanpa mengintervensi. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan inklusi diterapkan di sekolah-sekolah, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi, strategi-strategi adaptasi yang digunakan, serta hasil-hasil yang diperoleh. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang implementasi kebijakan ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SLTA Kota Palu Berdasarkan Teori Thomas R. Dye

4.1.1. Kebijakan sebagai Apa yang Dilakukan (*Policy as What Government Does*)

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Kota Palu, telah menyusun dan mensosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan inklusi, seperti: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas), Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Layak, dan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Palu tentang sekolah inklusi. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah memilih untuk bertindak dalam menjamin hak pendidikan ABK. Bahkan beberapa sekolah di Kota Palu telah ditunjuk menjadi sekolah inklusi dan menerima alokasi anggaran untuk kebutuhan ABK. Namun, dari hasil observasi dan wawancara, implementasi di lapangan masih bersifat simbolik. Banyak sekolah yang hanya mencantumkan status "inklusif" tanpa didukung oleh kesiapan nyata dari sisi tenaga pendidik, kurikulum, maupun sarana prasarana. Hal ini memperlihatkan kelemahan dalam kebijakan implementatif yang seharusnya mengawal kebijakan formal dengan tindakan nyata dan terstruktur.

4.1.2 Kebijakan sebagai Apa yang Tidak Dilakukan (*Policy as What Government Does Not Do*)

Dalam konteks Kota Palu, terdapat indikasi bahwa pemerintah belum mengambil tindakan optimal dalam beberapa aspek penting, antara lain: Tidak melakukan penguatan kompetensi guru reguler dalam menghadapi ABK di ruang kelas inklusif, Tidak memastikan keberadaan guru pendamping khusus (GPK) di semua sekolah inklusi tingkat SLTA, Belum menyediakan anggaran operasional yang memadai untuk kegiatan pendukung inklusi, seperti pelatihan, alat bantu belajar, dan konseling dan Belum ada sistem evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas implementasi pendidikan inklusi di sekolah-sekolah. Menurut Thomas R. Dye, ketidakhadiran tindakan ini juga merupakan bentuk kebijakan, yang dalam konteks pendidikan inklusi berdampak serius pada pemenuhan hak-hak ABK dan kualitas layanan pendidikan.

4.1.3 Konsekuensi dari Kebijakan "Do" dan "Not Do"

Perbedaan antara apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah menunjukkan adanya gap kebijakan yang signifikan. Ketika pemerintah memilih untuk mengeluarkan kebijakan (do) namun tidak mengawalinya dengan implementasi yang konsisten (not do), maka terjadi pelaksanaan kebijakan yang lemah, inkonsisten, dan tidak berdampak nyata pada kelompok sasaran (dalam hal ini ABK). Kondisi ini memperkuat temuan bahwa sebagian besar SLTA di Kota Palu belum mampu menerjemahkan kebijakan inklusi ke dalam sistem manajemen dan praktik pembelajaran yang efektif, meskipun secara administratif mereka telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi.

5. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SLTA Kota Palu menggambarkan bagaimana “apa yang dilakukan” belum sepenuhnya diimbangi oleh “apa yang seharusnya dilakukan”. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa dalam konteks teori Thomas R. Dye, pemerintah telah memilih untuk bertindak pada level kebijakan formal, tetapi belum menunjukkan komitmen kuat dalam level kebijakan implementatif, terutama dalam hal pendampingan, pengawasan, dan penyediaan sumber daya. Meskipun Dinas Pendidikan telah menunjukkan dukungan terhadap program inklusi, namun lemahnya monitoring dan kurangnya program penguatan kapasitas sekolah menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan secara sistemik dan terstruktur. Hal ini memperkuat pendapat bahwa implementasi kebijakan inklusi memerlukan komitmen lintas sektor, tidak hanya di level sekolah, tetapi juga di level kebijakan daerah.

Dampak dari implementasi yang belum optimal ini adalah terhambatnya pemenuhan hak-hak pendidikan bagi ABK di tingkat SLTA. Dalam beberapa kasus, siswa ABK tidak memperoleh pembelajaran yang sesuai kebutuhan khususnya, atau bahkan mengalami diskriminasi non-formal. Padahal, konstitusi menjamin hak pendidikan setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Referensi

Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, 15th ed. (Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2013), 3
Wikipedia, “Thomas R. Dye,” *Biografi*, n.d., https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_R._Dye, diakses tanggal 29 Oktober 2024 pukul 18.26 Wita.